NEGARA, OMBUDSMAN, DAN CITA-CITA KEADILAN MOHAMMAD NATSIR

Jum'at, 28 Agustus 2026 - Nurul Istiamuji

Jika kita merenungkan kembali alasan keberadaan sebuah negara, kita akan tiba pada sebuah kesimpulan fundamental: negara bukanlah sebuah entitas yang diciptakan untuk berkuasa atas rakyatnya, melainkan sebagai instrumen pelayan bagi kemanusiaan.

Cendekiawan dan Bapak Bangsa kita, Mohammad Natsir, dengan sangat jernih mengingatkan bahwa negara bukanlah tujuan akhir, melainkan hanyalah sebuah "alat" untuk mewujudkan kesempurnaan berlakunya hukum-hukum Ilahi demi kemaslahatan masyarakat.

Lalu, apa makna sejati dari negara yang melayani rakyat? Dan bagaimana Ombudsman memegang peranan krusial dalam menjaga agar negara tidak menyimpang dari kodratnya?

Negara Sebagai Institusi Pelayan Kebutuhan Jasmani dan Rohani Dalam pandangan Natsir, negara adalah sebuah institution (institusi) yang memiliki tugas dan tujuan khusus untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, baik di lapangan jasmani maupun rohani. Agar dapat berfungsi secara sejati, fondasi negara haruslah "hidup dan tertanam kuat dalam kalbu masyarakat."

Pemikiran luhur Natsir ini menemukan manifestasi hukum dan konstitusionalnya di masa kini. Ketika kekuasaan negara diabdikan semata-mata untuk pelayanan publik, di situlah cita-cita "Demokrasi Teistik" yang digagas Natsir menemukan relevansinya-sebuah demokrasi yang tidak sekadar mengagungkan kebebasan sekuler, tetapi demokrasi di mana kekuasaan yang diperoleh dari kerelaan rakyat digunakan sepenuhnya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Natsir sendiri telah memberikan keteladanan yang luar biasa sebagai seorang pemimpin bertipe administrator. Ia sangat meyakini bahwa penegakan rule of law dan tertib administrasi adalah tiang pokok demokrasi politik.

Saat menjabat sebagai Perdana Menteri, Natsir membuktikan bahwa aparatur negara harus mengalokasikan dana semata-mata untuk kepentingan publik serta menolak keras kebijakan patronal yang memberi keuntungan pribadi atau partai dari dana pemerintah. Nilai kesukaan membela yang lemah dan tidak mementingkan diri sendiri benar-benar mewujud dalam etika kepemimpinannya.

Ombudsman RI Sebagai Penjaga Keadilan dan Musyawarah Di tengah birokrasi modern yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, Ombudsman RI hadir sebagai penjaga gawang pelayanan publik. Dibentuk dengan semangat reformasi, Ombudsman bertujuan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) agar rakyat memperoleh keadilan dan kesejahteraan.

Menariknya, pendekatan Ombudsman dalam menindaklanjuti dugaan maladministrasi sangat sejalan dengan wawasan politik Natsir. Undang-Undang Ombudsman mewajibkan lembaga ini untuk mengutamakan pendekatan persuasif, menjadi pendengar yang tidak memihak, serta memprioritaskan penyelesaian secara mediasi dan konsiliasi. Hal ini adalah refleksi nyata dari nilai musyawarah yang selalu dikedepankan Natsir sebagai perintah Ilahiah untuk memecahkan berbagai persoalan publik secara adil dan damai.

Keteladanan dan Etika Pengabdian Natsir telah mengajarkan kepada kita makna pengabdian yang autentik melalui

kesederhanaannya: seorang menteri yang tak malu memakai kemeja bertambal dan mengayuh sepeda ke kantor, serta seorang mantan Perdana Menteri yang tanpa ragu mengembalikan mobil dinasnya di hari ia turun dari jabatan, lalu pulang menggunakan sepeda.

Keteladanan Natsir memberikan pelajaran abadi bagi para penyelenggara pelayanan publik dan pejabat negara masa kini: bahwa jabatan bukanlah alat untuk memperkaya diri, mendistribusikan proyek kepada kroni, atau menikmati kemewahan, melainkan sarana pengabdian yang mutlak tunduk pada etika, kejujuran, dan akuntabilitas publik.

Pada akhirnya, cita-cita menjadikan negara ini bermartabat membutuhkan sinergi. Aparatur pelayanan publik harus bekerja dengan integritas ala Natsir, dan Ombudsman harus terus mengawasi dengan keberanian moral yang tak tergoyahkan.

Ketika negara melayani dengan kejujuran dan Ombudsman memastikan tidak ada satu pun warga yang terabaikan haknya, maka cita-cita kesejahteraan yang diridhai Tuhan tidak sekadar menjadi mimpi, melainkan menjelma menjadi realitas yang menerangi kalbu pertiwi.